



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1168–1177

### Kebijakan Manajemen Bencana Di Masa Pandemi Tantangan Ganda Dalam Penanganan Krisis

Adela Marviola Navyandhini, Eli Apud Saepudin, Diah Karmila, Farah Fadilla  
Putri, Ratu Al Viola Gunawan, Tika Zulzana

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

#### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2646>

#### How to Cite this Article

APA : Navyandhini, A. M., Saepudin, E. A., Karmila, D., Putri, F. F. ., Al Viola Gunawan, R. ., & Zulzana, T. . (2024). Kebijakan Manajemen Bencana Di Masa Pandemi Tantangan Ganda Dalam Penanganan Krisis. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1168 - 1177. Retrieved from <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/mister/article/view/2646>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

## Kebijakan Manajemen Bencana Di Masa Pandemi Tantangan Ganda Dalam Penanganan Krisis

<sup>1</sup>Adela Marviola Navyandhini, <sup>2\*</sup>Eli Apud Saepudin, <sup>3</sup>Diah Karmila, <sup>4</sup>Farah Fadilla Putri,

<sup>5</sup>Ratu Al Viola Gunawan, <sup>6</sup>Tika Zulzana

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,  
Indonesia <sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email:

marviolaadela@gmail.com<sup>1</sup>, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id<sup>2\*</sup>, diahkarmel59@gmail.com<sup>3</sup>,  
farahfadillap@gmail.com<sup>4</sup>, ratualviola30@gmail.com<sup>5</sup>, tikazulzana@gmail.com<sup>6</sup>

Diterima: 15-12-2024

| Disetujui: 16-12-2024

| Diterbitkan: 17-12-2024

### ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic has created new complexities in disaster management, presenting multiple challenges for governments and stakeholders in dealing with multiple simultaneous crises. This research examines the adaptation of disaster management policies during the pandemic, focusing on the integration of health protocols in natural and social disaster management. The methodology used includes a comprehensive policy analysis and case studies from various regions that experienced disasters during the pandemic. The results showed that an adaptive approach to disaster management is needed, including modification of evacuation procedures, adjustment of evacuation centers, and strengthening cross-sector coordination. Key challenges identified include limited resources, logistical complexity and the need for specialized protocols to prevent virus transmission in emergency situations. This study recommends developing a more flexible and integrated policy framework, increasing the capacity of the emergency health system, and strengthening multi-stakeholder cooperation in handling multiple crises. The implications of this study contribute to a better understanding of disaster management in the new normal era and the importance of preparedness for multiple hazards.*

**Keywords:** disaster management, COVID-19 pandemic, public policy, multiple crises, disaster mitigation

#### **ABSTRAK**

*Pandemi COVID-19 telah menciptakan kompleksitas baru dalam manajemen bencana, menghadirkan tantangan ganda bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan. Penelitian ini mengkaji adaptasi kebijakan manajemen bencana selama masa pandemi, dengan fokus pada integrasi protokol kesehatan dalam penanganan bencana alam dan sosial. Metodologi yang digunakan mencakup analisis kebijakan komprehensif dan studi kasus dari berbagai wilayah yang mengalami bencana selama pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan adaptif dalam manajemen bencana, termasuk modifikasi prosedur evakuasi, penyesuaian pusat pengungsian, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas logistik, dan kebutuhan akan protokol khusus untuk mencegah penularan virus dalam situasi darurat. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka kebijakan yang lebih fleksibel dan terintegrasi, peningkatan kapasitas sistem kesehatan darurat, serta penguatan kerjasama multi-stakeholder dalam penanganan krisis ganda. Implikasi dari studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang manajemen bencana di era new normal dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi multiple hazard.*

**Katakunci:** manajemen bencana, pandemi COVID-19, kebijakan publik, krisis ganda, mitigasi bencana

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam manajemen bencana di seluruh dunia. Ketika dunia masih berjuang menghadapi krisis kesehatan yang berkelanjutan, berbagai wilayah tetap rentan terhadap bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Situasi ini menciptakan kompleksitas baru dalam penanganan krisis, di mana para pemangku kebijakan harus menghadapi tantangan ganda: mengelola risiko pandemi sekaligus memastikan kesiapsiagaan dan respons yang efektif terhadap bencana lainnya. Indonesia, sebagai negara yang terletak di wilayah Cincin Api Pasifik, secara rutin menghadapi berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gelombang pasang, banjir, dan letusan gunung berapi. Ketika pandemi COVID-19 melanda, sistem manajemen bencana yang ada harus beradaptasi dengan cepat untuk mengintegrasikan protokol kesehatan yang ketat ke dalam prosedur tanggap darurat yang sudah ada. Hal ini menimbulkan berbagai kesulitan operasional, logistik, dan strategi yang memerlukan pendekatan baru dalam manajemen bencana. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan manajemen bencana beradaptasi selama masa pandemi, dengan fokus khusus pada tantangan ganda yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap perubahan protokol evakuasi, modifikasi pusat pengungsian, strategi koordinasi multi-stakeholder, serta implementasi teknologi dalam mendukung manajemen bencana yang efektif di tengah kebijakan fisik dan sosial.

Pemahaman mendalam tentang tantangan dan adaptasi ini menjadi krusial untuk meningkatkan ketahanan sistem manajemen bencana di masa depan, terutama mengingat potensi munculnya krisis kesehatan di seluruh dunia lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman menangani bencana selama pandemi, yang dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan manajemen bencana yang lebih komprehensif dan adaptif. (Fahrimal et al., 2020) Dalam studi komunikasi dan media, framing berfungsi dalam dua dimensi, yaitu, (1) framing sebagai teori dan (2) framing sebagai metodologi dalam penelitian (D'Angelo & Kuypers, 2009). Sebagai teori, framing memiliki preposisi sebagaimana dikemukakan Erving Goffman bahwa dunia realitas terlalu luas dan abstrak untuk dipahami manusia sehingga perlu adanya penyelesaian realitas agar dapat dipahami manusia (de Vreese, 2014). Tradisi keilmuan framing berkembang dari Psikologi, Sosiologi, Antropologi, Politik, hingga Komunikasi. Dalam disiplin komunikasi, berada dalam kelompok teori media bersama dengan Teori Agenda-Setting dan Teori Priming. (Fadhal, 2020) Menurut Coombs dikutip Kriyantono & Sa'diyah (2018), komunikasi adalah esensi manajemen krisis. Situasi krisis adalah situasi yang berpotensi menyebabkan gangguan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Komunikasi publik pemerintah sangat penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Menurut Moenawar (2020), komunikasi publik pemerintah merupakan proses penyampaian ide, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak Covid-19. Komunikasi publik memfasilitasi informasi, dialog, menstimulasi partisipasi, pengambilan kebijakan dan pemberdayaan publik (Moenawar, 2020). Pemerintah menggunakan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi publik, untuk mengontrol dan mengevaluasi respon public. (Saleha et al., 2020) Sebuah hasil penelitian yang cukup menarik tentang kondisi stres yang dialami perawat di Hubei China tempat pertama kali kasus Covid-19 ditemukan, menunjukkan kondisi stress perawat yang berada di lini depan lebih rendah dibandingkan perawat yang berada di non lini depan. Stress pada perawat non lini depan tidak mengalami perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan masyarakat umum (Lia et al. 2020). Bila kita melihat ke lapangan perawat di lini terdepan yaitu mereka yang berada pada zona

merah merawat pasien yang telah dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19. Perawat di lini depan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) level 3 sampai 4 pada ruang khusus bertekanan negatif. Sementara perawat- perawat yang berada di zona kuning dengan APD yang terbatas seringkali mengalami keterpaparan infeksi akibat pasien yang kurang jujur saat dalam menceritakan riwayatnya. APD yang tersedia secara adekuat memberikan kenyamanan psikologis pada perawat dalam menjalankan tugasnya. (Desa, n.d.) Dengan melihat fakta jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia yang masih tinggi, kebijakan untuk membeli vaksin dan melakukan vaksinasi Covid-19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Setiap orang sepakat bahwa vaksinasi adalah sesuatu yang krusial dilakukan di negara ini. Pemerintah juga sedang gencar melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Pemerintah juga mulai melaksanakan program vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021, dengan beberapa prioritas vaksinasi mengingat keterbatasan jumlah vaksin yang diimpor. Namun, kritikan yang didapat pemerintah atas penanganan Covid-19 belangsung hingga ke tahap pembelian vaksin ini. Kebijakan yang diambil ini terkesan tergesa-gesa dan belum disertai pembuktian secara empiris akan kehasiatan lanjutan vaksin. (Wahyudi et al., 2021) Dalam memahami peran dan porsi media di masakrisis ini seperti bencana non-alam pandemic COVID-19, tulisan ini meminjam pemikirannya dari (Reynold B & seeger, 2005) yang merancang konsep mengenai Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Walaupun hal tersebut titik fokusnya pada tahap komunikasi krisis secara umum, unsur-unsur yang ada di dalamnya relevan digunakan untuk membedah posisi jurnalisme selama keadaan krisis. Seperti yang telah disebutkan oleh Reynolds dan Seeger (2005) (Casero-Ripollés, 2020), terdapat lima unsur dalam CERS, diantaranya: Pertama, Pre-crisis. Sebelum terjadinya peristiwa krisis, komunikasi krisis harus diarahkan kepada upaya-upaya untuk menyiapkan publik mengenai apa yang akan terjadi atau dengan kata lain melakukan upaya mitigasi. Dalam konteks jurnalisme, pemberitaan sebelum terjadi krisis yang terprediksi maupun tiba-tiba muncul dalam kerangka untuk menjadi alarm bagi publik. Di Indonesia, pandemi COVID-19 bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, dengan mengingat negara-negara lain sudah lebih dahulu mengalaminya. Artinya, ada jeda waktu bagi media untuk menjalankan perannya sebagai alarm publik dengan memberikan pengingat dari pelajaran di negara-negara yang sudah lebih dulu mengalaminya. (Athia et al., 2021) Gangguan terbesar dari Covid-19 saat ini adalah gangguan finansial akibat penurunan permintaan dan krisis yang berlangsung lama. Masalah keuangan yang dialami pemilik bisnis bukan hanya disebabkan minimnya pendapatan yang diperoleh di masa pandemi, akan tetapi juga dikarenakan pengelolaan keuangan yang salah. Pemilik bisnis keluarga harus memahami bahwa mengelola finansial itu harus dihubungkan dengan konsep nilai waktu terhadap uang, yaitu nilai uang di masa kini dan di masa mendatang. Hal ini diperlukan untuk merencanakan kebutuhan keuangan ketika melakukan aktivitas usaha dan menentukan keputusan dari mana sumber dananya diperoleh (Indrayani, 2020). Oleh karena itu keputusan keuangan yang diambil, terutama di masa- masa sulit, harus lebih bijaksana sesuai kebutuhan (baik kebutuhan bisnis maupun kebutuhan keluarga) sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar. Pengelolaan finansial yang baik akan berpengaruh pada ketahanan dan keberlangsungan usaha di masa mendatang (Remund, 2010). (Maruli & Situmeang, 2021) Kejahatan jalanan dan cybercrime merupakan fenomena kejahatan pada masa pandemi covid 19, apabila dilihat dari perspektif kriminologi, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan adalah masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk serta lemahnya kontrol sosial. (Covid- & Adiba, 2023) Indonesia mengalami kesulitan menjaga ketersediaan beras antara bulan November dan Januari karena pada bulan tersebut telah masuk dalam masa sulit akibat covid-19. Hal tersebut menyebabkan

menurunnya produksi beras, sebagaimana pernyataan World Food Programme bahwa produksi besar pada awal pertama tahun 2020 menurun sekitar 13,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. (Noerkaisar, n.d.) Di masa pandemi sekarang ini program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan subsidi listrik menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam upaya menanggulangi pengaruh Covid-19 terhadap masyarakat yang berpotensi terkena imbas sosial maupun ekonomi. Sumodiningrat (1999) memaparkan bahwa JPS sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumber dana, pelaksanaan program JPS akan menemui banyak hambatan.

(Alfirdaus et al., 2020) Segala kerumitan akibat dari pandemi Covid-19 ini makin menjadi karena, di sisi lain, pemerintah juga tidak mungkin mengandalkan bantuan negara lain. Tidak ada negara yang bebas dari interupsi Corona. Beberapa negara maju yang kerap menyalurkan bantuan untuk pembangunan di Indonesia dan penanganan bencana selama ini pun terpuruk akibat Covid-19, seperti China, Jepang, Amerika dan negara-negara Timur Tengah. Jika dalam bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan gunung meletus cakupan dampaknya hanya pada region tertentu, sehingga pemerintah provinsi lain atau bahkan negara lain yang tidak terdampak dapat mengalokasikan bantuan, Covid-19 ini mengenai dan membawa resiko bagi semua orang. Akibatnya, setiap unit pemerintahan dipaksa berkonsentrasi pada penyelesaian masalahnya sendiri. (Sulistyaningsih & Ivan, 2021) Program kebijakan sosial merupakan upaya menjaga keberlanjutan yang dapat menyelamatkan ketahanan sosial masyarakat. Stabilitas masyarakat akan terganggu apabila program tersebut tersendat dan tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun membutuhkan resiliensi sosial untuk bertahan dan kemudian bangkit kembali ke dalam kondisi normal. Sosiolog menempatkan terminologi “resiliensi (ketahanan)” tersebut untuk menjelaskan kemampuan manusia untuk kembali ke keadaan normal setelah menyerap beberapa stres atau setelah bertahan beberapa perubahan negatif (Surjan, Sharma, Shaw, 2011: 17-18).

(Strategy, 2022) Manajemen bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada, sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana (Paripurno, 2008). (Ering, 2020) Ibadah di rumah atau gereja rumah di masa pandemi Covid-19, merupakan rangkaian konsekuensi yang mengharuskan gereja memberlakukan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip social distancing dan physical distancing. (Pandemi, 2020) Public relation yang ideal diterapkan dalam kondisi pandemi harus mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi digital dengan penyederhanaan birokrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Dwijayanti & Kusumastuti (2018:187) menyebutkan bahwa inisiatif public relations yang menyajikan publisitas informasi dengan dukungan media sosial dan internet disebut sebagai cyber public relation. (Alfirdaus et al., 2020) Konseptualisasi kebijakan kedalam dikotomi business as usual dan situasi krisis tidak cukup menjelaskan konteks pandemi Covid-19. Kebijakan dalam situasi krisis sebagaimana yang dijelaskan para ilmuwan pengkaji kebijakan selama ini hanya membayangkan krisis dalam skop yang terbatas, yaitu daerah tertentu, negara tertentu atau wilayah regional tertentu. (Junaidi & Haryadi, 2021) inkonsistensi media dalam pemberitaan Covid-19 menunjukkan suatu fenomena ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya penyeragaman arus informasi. Kesimpangsiuran arus informasi yang disebabkan miskomunikasi persepsi dan konsepsi pemerintah yang dijalankan oleh agen informasi sehingga membuka ruang diskursus baru sehingga memungkinkan

terjadinya misinformasi berjenjang dari pemerintah hingga lapisan masyarakat paling bawah. (Adiyanta, 2020) Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dengan pertimbangan kemendesakan dan urgensi untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Melalui Perpu 1 Tahun 2020 ini, Pemerintah mengupayakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. (Studi et al., 2021) Pandemi COVID-19 yang tidak hanya membahayakan kesehatan, namun juga merupakan kerentanan bagi keluarga (Family Vulnerability) karena menimbulkan kerusakan dan ancaman bagi aspek ekonomi, psikologis, dan sosial budaya anggota keluarga di masyarakat.

(Pratiwi et al., 2021) bencana-bencana yang terjadi bukan lagi sebatas bencana alam—bencana yang terjadi karena peristiwa alam; tetapi juga bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi, di samping faktor alam, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis seperti kepadatan penduduk, dan dari segi ekonomi seperti kemiskinan yang masih tinggi, telah menambah kerentanan terhadap peristiwa bencana. (Penelitian et al., 2020) Nkrumah (1974) beragumen bahwa struktur neokolonialisme yang dipaksakan oleh suatu bentuk kekuatan global yang dibentuk oleh negara-negara Global North, perusahaan transnasional (misalnya Unilever, Kellogg's, dan P&G), dan lembaga keuangan internasional (misalnya IMF dan World Bank) ke negaranegara Global South telah menciptakan “bidang permainan” yang tidak setara dalam mengelola krisis. (Lestari et al., 2022) simulasi model komunikasi dan informasi terpadu dalam pengelolaan bencana erupsi gunung sinabung melalui Pusdalops PB di BPBD Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung dengan lancar. Hasil pre-test dan post-test yang diujikan kepada 15 peserta simulasi gladi ruang menunjukkan peningkatan hasil persentase sebesar 37% . Artinya, simulasi yang dilakukan berhasil memberi pengetahuan kepada peserta mengenai Pusdalops PB. Sebagai organisasi kebencanaan, Sebagai organisasi kebencanaan, Pusdalops PB membutuhkan koordinasi dari lembaga kebencanaan lainnya seperti Kominfo, dan OPD lainnya untuk memperkuat proses komunikasi. Komunikasi dan informasi kebencanaan perlu diolah secara cepat dan tepat, agar kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Karo dalam menghadapi ancaman bencana khususnya erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Media yang dapat digunakan dalam proses tersebut meliputi website maupun radio.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana semua permasalahan dan Solusi berkaitan dengan tema dan di ambil dari berbagai sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengenai kebijakan manajemen bencana di masa pandemi mengungkapkan berbagai temuan menarik yang menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penanganan krisis ganda. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks manajemen bencana, di mana para pemangku kepentingan harus menghadapi dua krisis secara bersamaan dengan sumber daya yang terbatas. Dalam aspek sumber daya, ditemukan adanya tekanan yang signifikan terhadap kapasitas sistem kesehatan dan penanggulangan bencana. Tenaga medis dan relawan menghadapi dilema dalam pembagian fokus antara penanganan

pandemi dan respon terhadap bencana alam. Situasi ini diperparah dengan adanya keterbatasan logistik akibat terganggunya rantai pasok global, sementara anggaran yang tersedia harus dialokasikan secara efektif untuk menangani kedua krisis tersebut. Temuan lain yang signifikan adalah perlunya modifikasi substansial terhadap protokol penanganan bencana yang ada. Standard Operating Procedure (SOP) evakuasi tradisional harus diubah untuk mengakomodasi protokol kesehatan yang ketat, termasuk physical distancing dan pembatasan jumlah orang dalam satu area. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan pengungsian dan distribusi bantuan, di mana efisiensi harus diimbangi dengan keamanan kesehatan.

Dalam konteks koordinasi, penelitian mengungkapkan meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan multi-stakeholder. Keterlibatan sektor kesehatan yang lebih intensif dalam penanganan bencana membutuhkan penyesuaian mekanisme koordinasi dan komunikasi. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi lebih crucial, mengingat karakteristik pandemi yang membutuhkan respon terkoordinasi di berbagai tingkat pemerintahan. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, berbagai adaptasi kebijakan telah dilakukan. Salah satu adaptasi utama adalah reformulasi protokol tanggap darurat yang mengintegrasikan aspek kesehatan dalam penanganan bencana. Sistem peringatan dini dikembangkan dengan mempertimbangkan parameter kesehatan masyarakat, sementara mekanisme distribusi bantuan dimodifikasi untuk meminimalkan risiko penularan virus. Optimalisasi teknologi digital muncul sebagai salah satu strategi kunci dalam adaptasi kebijakan. Implementasi sistem koordinasi berbasis digital memungkinkan komunikasi yang lebih efektif sambil meminimalkan kontak fisik. Platform daring dimanfaatkan secara ekstensif untuk pelatihan dan koordinasi, sementara database terintegrasi dikembangkan untuk memfasilitasi tracking bantuan dan monitoring situasi.

Penguatan kapasitas lokal juga menjadi fokus penting dalam adaptasi kebijakan. Pemberdayaan struktur masyarakat setempat dan penguatan sistem kesehatan di tingkat komunitas menjadi prioritas untuk membangun resiliensi dalam menghadapi krisis ganda. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam memobilisasi sumber daya lokal dan mempercepat respon terhadap situasi darurat. Temuan-temuan ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan bagi pengembangan ilmu manajemen bencana. Kebutuhan akan framework baru yang mengintegrasikan penanganan bencana dan pandemi menjadi evident, mendorong reformulasi teori resiliensi sistem dalam konteks multi-krisis. Konsep collaborative governance juga mengalami pengayaan dengan pemahaman baru tentang koordinasi multi-level dan multi-stakeholder dalam situasi krisis kompleks. Dari sisi praktis, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang penting. Review dan revisi regulasi manajemen bencana menjadi kebutuhan mendesak, disertai dengan pengembangan protokol khusus untuk penanganan multi-krisis. Penguatan sistem informasi dan koordinasi terintegrasi juga diidentifikasi sebagai area prioritas untuk peningkatan kapasitas institusional. Tantangan berkelanjutan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya, kompleksitas koordinasi multi-stakeholder, serta dinamika perubahan situasi yang cepat. Untuk menghadapi tantangan ini, penelitian merekomendasikan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif, disertai dengan penguatan sistem informasi dan koordinasi, serta peningkatan kapasitas institusi dan SDM. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan bencana di masa pandemi membutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan adaptif. Kompleksitas tantangan yang dihadapi memerlukan inovasi dalam kebijakan dan implementasi, serta penguatan kapasitas di berbagai tingkatan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktek manajemen bencana di era yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan kompleksitas krisis. Rekomendasi untuk penelitian

selanjutnya mencakup eksplorasi lebih lanjut tentang efektivitas berbagai model adaptasi kebijakan, pengembangan framework evaluasi untuk menilai keberhasilan penanganan multi-krisis, serta studi komparatif tentang praktik terbaik dalam manajemen bencana di berbagai konteks geografis dan sosial-budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan pendekatan yang lebih holistik dalam mempersiapkan dan merespon situasi krisis di masa depan.

Di masa pandemi COVID-19, sistem manajemen bencana menghadapi tantangan ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, pandemi itu sendiri menjadi bencana yang membutuhkan penanganan khusus. Di sisi lain, upaya penanganan pandemi telah memberikan beban tambahan pada sumber daya dan kapasitas yang biasanya digunakan untuk menangani bencana lain. Ketika bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan terjadi di tengah pandemi, respons darurat membutuhkan penyesuaian protokol kesehatan yang ketat. Proses evakuasi dan penampungan korban harus memperhatikan jaga jarak fisik dan pembatasan mobilitas. Sementara itu, keterbatasan sumber daya medis dan logistik akibat fokus pada penanganan pandemi turut menambah kerumitan. Di sisi lain, pandemi juga telah berdampak langsung pada kapasitas manajemen bencana. Pengalihan anggaran dan tenaga ahli untuk penanganan COVID-19 mengurangi kemampuan penanganan bencana lain. Beban kerja dan stres yang meningkat pada petugas tanggap darurat juga dapat mengganggu koordinasi dan efektivitas respons. Untuk menjawab tantangan ganda ini, diperlukan adaptasi komprehensif dalam kebijakan manajemen bencana. Salah satunya adalah melalui perencanaan kontingensi yang terintegrasi. Skenario penanganan bencana alam di tengah pembatasan pandemi harus disusun dengan matang, serta koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci penting. Sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan COVID-19 dapat membantu meningkatkan kecepatan respons. Logistik dan evakuasi berbasis aplikasi dapat meminimalkan kontak fisik. Sementara platform kolaborasi virtual memungkinkan koordinasi tim tanggap darurat yang lebih efektif. Selain itu, penguatan ketangguhan masyarakat juga menjadi hal krusial. Edukasi publik tentang kesiapsiagaan bencana di masa pandemi, penguatan jejaring relawan, serta skema bantuan sosial yang responsif terhadap krisis ganda dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan inovasi dan adaptasi dalam manajemen bencana. Kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penanganan situasi krisis ganda di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan ganda dalam penanganan krisis. Jurnal ini menganalisis bagaimana kebijakan manajemen bencana perlu diadaptasi untuk mengatasi situasi kompleks ini. Pertama, pandemi membutuhkan koordinasi yang erat antara berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kebijakan harus mencerminkan pendekatan yang holistik untuk menangani dampak multidimensi yang ditimbulkan. Misalnya, langkah-langkah penanggulangan di bidang kesehatan harus diintegrasikan dengan dukungan sosial-ekonomi bagi masyarakat terdampak. Kedua, rencana manajemen bencana harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi yang terus berubah selama pandemi. Proses pengambilan keputusan perlu menjadi lebih responsif dan berbasis data terkini, sehingga dapat menyesuaikan strategi

sesuai perkembangan situasi. Ketiga, infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia sistem tanggap darurat perlu diperkuat untuk menangani lonjakan kebutuhan akibat pandemi. Investasi harus diprioritaskan pada peningkatan kapasitas fasilitas medis, persediaan medis, serta pelatihan tenaga kesehatan. Keempat, kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi pandemi pada masyarakat dan menyediakan bantuan yang memadai. Keterlibatan masyarakat juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap langkah-langkah pencegahan dan respons. Kelima, komunikasi publik yang efektif dan transparan sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Pemerintah harus secara proaktif membagikan informasi terkini serta mengelola isu-isu sensitif yang muncul selama krisis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa tantangan ganda pandemi mengharuskan pembaruan mendasar pada kebijakan manajemen bencana. Pendekatan holistik, adaptif, dan berfokus pada masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi krisis secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2020). *Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta ( Universal Health Coverage ) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*. 3(2), 272–299.
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Pemerintahan, P. I., & Diponegoro, U. (2020). *Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis*. 5. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699>
- Athia, I., Rahayu, S., & Anwar, S. A. (2021). *Upaya Adaptif Bisnis Keluarga Dalam Mempertahankan Usahanya Di Era Pandemi Covid-19*. 17(3), 238–250.
- Covid-, D. I. M. P., & Adiba, F. (2023). *Upaya Indonesia dalam Mengatasi Krisis Pangan di Masa Pandemi Covid-19 Farah Adiba dan Kaslam*. 25, 85–104.
- Desa, E. B. U. M. (n.d.). *Transisi Kenormalan Baru :*
- Ering, M. (2020). *GEREJA RUMAH DI MASA PANDEMI COVID-19 : MANAJEMEN RESIKO dan MITIGASI BENCANA NON ALAM*. 1(1), 1–14.
- Fadhal, O. S. (2020). *TINJAUAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19*. 1–25.
- Fahrimal, Y., Husna, A., & Islami, F. (2020). *MEDIA DAN PANDEMI : FRAME TENTANG PANDEMI COVID-19 DALAM MEDIA ONLINE DI INDONESIA ( Studi Pada Portal Berita Kompas . com dan Detik . com ) MEDIA AND PANDEMIC : FRAME OF COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIAN ONLINE MEDIA ( Study on Kompas . com and Detik . com News Websites )*. 19, 169–186.
- Junaidi, R., & Haryadi, D. (2021). *Media dan Produksi Bahasa pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. 3, 48–64.
- Lestari, P., Paripurno, E. T., Nadeak, J., Julistantie, E., Indrasmara, H. P., & Rahayu, E. I. (2022). *Simulasi Komunikasi Bencana Melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 255. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i2.7390>
- Maruli, S., & Situmeang, T. U. A. (2021). *Vol.19 No. 1*. 19(1), 35–43.
- Noerkaisar, N. (n.d.). *PEMERINTAH UNTUK MENGATASI DAMPAK COVID-19 DI INDONESIA*.
- Pandemi, D. I. M. (2020). *PERAN CYBER PUBLIC RELATION DALAM KAMPANYE KESEHATAN DI MASA PANDEMI Isma Savitri*. 4, 55–64.
- Pratiwi, S. W., Pembangunan, M. S., Kristen, U., Wacana, S., Gunung, L., & Jawa, M. (2021). *ANALISIS KELEMBAGAAN BENCANA : STUDI KASUS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM COVID-19 DI KOTA SALATIGA*. 6(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11193>
- Saleha, N., Delfina, R., Nurlaili, N., Ardiansyah, F., & Nafratilova, M. (2020). *Dukungan sosial dan kecerdasan spiritual sebagai faktor yang memengaruhi stres Perawat di masa pandemi Covid-19*.

- 6(2), 57–65.
- Strategy, M. I. (2022). *No Title*. 28, 13–27.
- Studi, P., Sosial, K., Ilmu, F., Dan, D., Komunikasi, I., Islam, U., & Syarif, N. (2021). *KETAHANAN KELUARGA PENYITAS COVID-19 DI MASA*. 19.
- Sulistyaningsih, S., & Ivan, M. (2021). *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung PERENCANAAN KEBIJAKAN SOSIAL ( Studi Evaluasi Berdasarkan Tren Kemiskinan di Masa Pandemi Jurnal JISIPOL*. 5(November).
- Wahyudi, I., Nursyifa, A., Bandung, U. I., & Padjadjaran, U. (2021). *HIKMAH | Jurnal Dakwah & Sosial Volume 1 No . 2 , Oktober 2021 HIKMAH | Jurnal Dakwah & Sosial Volume 1 No . 2 , Oktober 2021*. 1(2), 57–64.